

Aktivitas Publikasi Humas

Terhadap Peningkatan kinerja Anggota DPRD Kota Kendari

Marwan S. Wanto, Muhammad Ihsan Mattalitti, Yunitawati Lampasa

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, email: awan8595@gmail.com

*Department of Government Studies, Faculty of Social and Political Sciences,
Universitas Muhammadiyah Kendari, email : ihsan.mattalitti@umkendari.ac.id*

*Department of Government Studies, Faculty of Social and Political Sciences,
Universitas Muhammadiyah Kendari, email: yunilampasa.fisip@gmail.com*

Abstract

The Regional People's Representative Council (DPRD) as a legislative institution that represents the aspirations of the community is always expected to run according to the expectations of the people. Their functions and responsibilities are the manifestations of activities that must be carried out fully to fulfill the will of the people. Therefore, the people have the right to know the activities that have been carried out by DPRD members when carrying out their duties during society. This research describes the publication activities carried out by Sub. The Public Relations and Protocol Section of the Kendari City DPRD where has implications for the performance of the members of the Kendari City DPRD. The research approach was carried out through qualitative methods. Research data obtained from the results of observations, interviews, and documentation. The results of this study indicate that through the activities of internal publication, external publication, and performance, it is seen that there is an impact on improving the performance of members of the Kendari City DPRD. This is measured based on indicators of productivity, responsiveness, and accountability. A publication that is carried out is effective in improving performance because it will create a positive image for DPRD Members that motivates them to work better.

Keywords: Good Governance, Represntative Council Responsibility

Abstrak

DPRD sebagai lembaga legislatif yang mewakili aspirasi masyarakat senantiasa diharapkan berjalan sesuai dengan harapan rakyat. Fungsi dan tanggung jawab mereka merupakan perwujudan aktivitas yang wajib dijalankan sepenuhnya dalam rangka memenuhi kehendak rakyat. Olehnya itu, rakyat berhak mengetahui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh anggota DPRD ketika menjalankan

tugasnya di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini menjelaskan aktivitas publikasi yang dilakukan oleh Sub. Bagian Humas Dan Protokoler DPRD kota Kendari yang berimplikasi terhadap kinerja anggota DPRD kota Kendari. Pendekatan penelitian dilakukan melalui metode kualitatif. Data penelitian diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui aktivitas publikasi internal, publikasi eksternal, dan kinerja, terlihat adanya dampak terhadap peningkatan kinerja Anggota DPRD Kota Kendari. Hal ini diukur berdasarkan indikator produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Publikasi yang dilakukan efektif meningkatkan kinerja sebab akan melahirkan citra Positif bagi Anggota DPRD yang memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik.

Kata Kunci : Good Governance, Kinerja DPRD Kendari, Tupoksi DPRD,

Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan wakil rakyat di parlemen yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu) di daerah. Keberadaan DPRD di daerah sering disebut sebagai fungsi representatif karena bertugas menyuarakan aspirasi masyarakat dan bertindak atas nama rakyat (representatif government) di bidang legislatif. Hal tersebut juga merupakan penerapan prinsip demokrasi dimana kedaulatan dan aspirasi masyarakat menjadi hal utama sehingga perlu dibentuk wakil rakyat yang bertugas untuk melakukannya.

Sebagai bentuk realisasi dari demokrasi di Indonesia seperti yang dijelaskan di atas, DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memang tidak bisa dipisahkan dari rakyat karena dalam sistem demokrasi menempatkan rakyat pada urutan pertama sebagai prioritas dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan. Oleh karena DPRD dipilih oleh rakyat sehingga ia harus bekerja untuk rakyat sehingga bentuk hubungan yang dimiliki oleh DPRD dengan rakyat adalah si wakil dan yang terwakili.

Selain itu, sebagai unsur Pemerintah Daerah yang mempunyai wewenang di bidang legislatif, DPRD memiliki beberapa hak dan kewajiban diantaranya adalah hak anggaran, hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan, hak mengadakan perubahan, hak mengajukan pernyataan pendapat, hak prakarsa dan hak penyelidikan yang kiranya hak – hak tersebut cukup luas untuk memungkinkan DPRD dalam menjalankan fungsinya sebagai unsur Pemerintah.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang personelnnya terdiri atas pegawai negeri sipil. Sekretariat DPRD adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, pendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dipimpin seorang sekretaris DPRD yang diangkat oleh kepala daerah. Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dalam sekretariat DPRD Kota Kendari dibentuk salah satu Sub. bagian yaitu Sub. Bagian Humas dan Protokol.

Aktivitas Humas DPRD Kota Kendari banyak berhubungan dengan masyarakat, mediator antara masyarakat dengan lembaga antara lain humas. menjembatani aspirasi masyarakat ke komisi terkait. Humas turut serta dengan anggota DPRD untuk melakukan reses yaitu satu kesempatan yang diberikan dalam satu masa sidang di mana para anggota DPRD untuk menemui konsituennya di daerah pemilihannya dalam rangka menyerap aspirasi dan mempublikasikan kegiatan antara lain dokumentasi, mengkliping koran yang memuat segala berita yang berhubungan dengan DPRD Kota Kendari. Humas dalam lembaganya harusnya menjalankan fungsi dengan baik dan serasi antara publik intern dan publik ekstern dalam rangka memberikan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi. Komunikasi sosial harus berkembang antara pemerintahan dan rakyat, kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya.

Ruslan (2010 : 343) menuliskan fungsi pokok Humas pemerintah Indonesia pada dasarnya antara lain sebagai berikut :

1. Mengamankan kebijaksanaan dan program kerja pemerintah yang diwakilinya,
2. Memberikan pelayanan, dan menyebarkan pesan atau informasi mengenai kebijaksanaan dan hingga program – program kerja secara nasional kepada masyarakat;
3. Menjadi komunikator dan sekaligus menjadi mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan –keinginan publiknya di lain pihak.
4. Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Berbagai perusahaan atau instansi, baik swasta maupun negeri yang bergerak di berbagai bidang mulai memperhatikan arti penting peranan humas seiring dengan perkembangan zaman saat ini. Sebagai suatu kegiatan yang akan memberikan masukan bagi pembangunan citra yang baik di dalam maupun di luar tubuh perusahaan itu sendiri. Humas yang memiliki peranan yang cukup besar dalam sebuah organisasi semakin terlihat seiring dengan era keterbukaan informasi publik saat ini. Humas yang merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi dan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan lembaga

pemerintahan kepada masyarakat ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah. Humas pula memiliki fungsi yang sangat penting yaitu membangun citra yang positif dari masyarakat bagi instansi tersebut.

Selama ini Masyarakat Kota Kendari tidak mengetahui apa saja yang di kerjakan oleh Anggota DPR Kota Kendari disebabkan kurangnya publikasi kegiatan DPRD, sehingga citra DPRD sangat buruk di mata masyarakat. Untuk itu di perlukan sebuah penelitian tentang publikasi kegiatan DPRD agar masyarakat dapat mengetahui kegiatan Anggota DPRD dan juga mengetahui adanya dampak publikasi bagi kinerja anggota DPRD.

Publikasi kegiatan anggota DPRD yang dilakukan oleh Sub Bagian Humas Dan Protokoler DPRD Kota Kendari bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui kerja anggota DPRD yang telah dipilih dan diharapkan dapat memberi motivasi kerja bagi anggota DPRD untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD serta memberikan citra positif bagi lembaga DPRD kota Kendari.

Metode Penelitian

lokasi penelitian terletak di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Kendari. peneliti mengambil Sampel berdasarkan pengamatan terhadap orang – orang yang dianggap lebih banyak mengetahui permasalahan penelitian yaitu responden 24 Anggota DPRD dan 2 informan yaitu Kasubag humas dan protokoler dan Staf sehingga jumlah keseluruhannya 26 Sampel. Dalam penelitian ini sumber data primer berupa kata – kata yang diperoleh dari wawancara dan hasil dari kuisioner dengan para informan yang telah ditentukan yang meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Publikasi Kegiatan Anggota DPRD Kota Kendari.

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa, profil Sekretriati DPRD Kota Kendari, Screen shot Media Publikasi Humas DPRD Kota Kendari, data alat Kelengkapan DPRD Kota kendari, sarana dan prasarana Humas dan Protokoler, Foto Majalah Dinding (madding) DPRD Kota kendari, foto Buletin DPRD Kota Kendari, foto-foto kegiatan DPRD Kota Kendari yang ada diSekretariat DPRD Kota Kendari tersebut.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitianini,baik data primer maupun data sekunder,digunakan metode penelitian sebagai berikut:

- a) Obsevasi di gunakan untuk mendapatkan informasi melalui pengamatan secara langsung
- b) Kuesioner digunakan untuk menjaring data dan informasi melalui data dan informasi melalui daftar pernyataan yang di sebar kepada responden.

- c) Wawancara digunakan untuk pengumpulan data dari informan melalui wawancara langsung.
- d) Dokumentasi digunakan untuk memperkuat hasil penelitian.

Analisis data yang digunakan, baik terhadap data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan didukung data kuantitatif. Untuk mengetahui adanya dampak Publikasi Sub. bagian humas dan Protokol dalam meningkatkan Kinerja Anggota DPRD Kota Kendari.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian dilakukan di kantor Sekretariat DPRD kota Kendari jln. Madusila (Poros bypass), Kel. Wundumbatu, Kec. Poasia. Yang merupakan kantor yang baru di resmikan pada 2017 lalu. Pada Sub. Bagian Humas dan protokol dengan Jumlah pegawai 11 orang.

Kota kendari sebagai sentral Sulawesi tenggara karena merupakan ibukota Provinsi Sulawesi tenggara dengan jumlah penduduk terbanyak di Sulawesi tenggara yang berdampak pada jumlah Kursi di DPRD Kota kendari yaitu berjumlah 35 kursi atau anggota DPRD. Kedudukan Sekretariat DPRD Kota Kendari pada pasal 5 peraturan walikota no.37 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Sekretaris DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota Kendari melalui Sekretaris Daerah Kota Kendari.

Dengan adanya Sekretariat DPRD Kota Kendari diharapkan dapat membantu tugas dan fungsi DPRD sebagai wakil Rakyat yang telah di pilih Oleh rakyat Kota Kendari pada pemilihan umum. Sekretariat DPRD Kota Kendari sebagai salah satu SKPD Kota Kendari yang memiliki urusan wajib di bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian berkewajiban mendukung arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2017 – 2021 yaitu : *“Mewujudkan Kota Kendari Kota Layak Huni yang Berbasis Ekologi, Informasi dan Teknologi.”*

A. Publikasi Internal

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa tugas Dari Sub. Bagian Humas Dan Protokol Sekretariat DPRD Kota kendari adalah melakukan Publikasi Kegiatan DPRD salah satunya dengan Publikasi internal. Melalui Observasi yang di lakukan Peneliti serta dengan wawancara peneliti melihat bahwa publikasi internal yang di lakukan Oleh Sub. Bagian Humas Dan Protokol Sekretariat DPRD Kota kendari menggunakan beberapa media yaitu Mading atau etalase yang di tempatkan pada

ruang tunggu sekretariat. Dan melalui Buletin yang berisi biodata seluruh anggota DPRD dan kegiatan DPRD yang selalu di bagikan kepada instansi atau tamu yang sedang berkunjung di Sekretariat DPRD Kota Kendari.

Tujuan dari publikasi internal agar dapat mempublikasikan kegiatan DPRD di lingkup sekretariat DPRD Kota kendari dan lingkup Instansi pemerintah Kota Kendari. Untuk mengetahui sejauh mana Publikasi Internal dapat memberikan dampak bagi peningkatan kinerja Anggota DPRD Kota Kendari maka peneliti menggunakan Angket yang berisi pernyataan yaitu Publikasi Internal dapat menjadi Motivasi bagi Anggota DPRD dalam meningkatkan Kinerjanya.

Adapun tanggapan responden dari hasil penelitian mengenai Dampak Publikasi Internal terhadap peningkatan Kinerja Anggota DPRD di mana dinyatakan sebanyak 0 responden atau 0% yang menyatakan sangat Berdampak, dan sebanyak 2 responden atau 8,33% yang menyatakan Berdampak, 6 responden atau 25% menyatakan Kurang Berdampak, serta 10 responden atau 41,66% yang menyatakan tidak Berdampak dan 6 atau 25% responden menyatakan Sangat Tidak Berdampak.

Dari tanggapan Responden terdapat 6 responden atau 25% menyatakan Kurang Berdampak, 10 responden atau 41,66% yang menyatakan tidak Berdampak dan 6 atau 25% responden menyatakan Sangat Tidak Berdampak. hal ini disebabkan Publik internal dan tamu yang menjadi sasaran publikasi internal adalah orang atau kelompok yang sudah saling mengenal dengan Anggota DPR atau orang yang mempunyai kepentingan terhadap anggota DPR tanpa memperdulikan kinerjanya (tim sukses) dan tamu yang berkunjung dari luar daerah yang tidak mempengaruhi elektabilitas anggota DPRD di daerah pemilihannya.

Besar kecilnya dampak publikasi internal terhadap peningkatan kinerja anggota DPRD Kota kendari juga dapat di lihat dari kinerja Staff Sub. Bagian Humas dan Protokoler dalam mengupdate Berita kegiatan DPRD pada media yang di gunakan dalam Publikasi internal serta bagaimana Sub. Bagian Humas dan Protokoler mendistribusikan berita Kegiatan yang di muat dalam Buletin atau majalah kepada instansi linkup pemerintah Kota kendari.

Dari observasi yang di lakukan peneliti melalui pengamatan pada madding yang berisi foto kegiatan DPRD masih terdapat berita kegiatan DPRD pada bulan januari 2020 dan desember 2019 sehingga Anggota DPRD sering memkomplain kepada Sub. Bagian Humas dan Protokoler karena kurang updatenya berita yang di muat pada madding begitu juga pada pendistribusian Buletin atau majalah DPRD Kota Kendari yang belum maksimal penyalurannya hal ini di buktikan dengan masih banyaknya Buletin yang di simpan pada Ruangan Sub. Bagian Humas dan Protokoler.

Hal ini di sebabkan karena kinerja Staaf Sub. Bagian Humas dan Protokoler yang sering kali menunda pekerjaan dan adanya kendala pada Fasilitas seperti

kendaraan dinas sehingga menghambat pendistribusian Buletin DPRD ke Intansi lingkup Pemerintah kota kendari. Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Bobi Adrian Sabara selaku Kasubag Sub. Bagian Humas dan Protokoler mengenai Bagaimana kinerja pegawai Sub. Bagian humas dan protokoler dalam mempublikasikan Kegiatan DPRD baik secara internal maupun eksternal.

Dari hasil wawancara dengan kasubag Sub. Bagian Humas dan Protokoler membenarkan bahwa staf yang diberikan tugas untuk menangani Publikasi internal melalui madding sering melupakan tugasnya untuk mengupdate berita terbaru kegiatan DPRD begitu juga kendala tidak adanya kendaraan dinas sehingga menghambat distribusi bulletin atau majalah kegiata DPRD ke intansi lingkup pemerintah Kota Kendari.

B. Publikasi Eksternal

Selain melakukan Publikasi internal Sub. Bagian Humas dan Protokoler juga melakukan Publikasi Eksternal dengan memanfaatkan Jaringan Internet seperti Website, dan media social seperti (Facebook, Instagram, youtube) tujuan dari publikasi eksternal ini agar dapat mempublikasikan Kegiatan DPRD kepada masyarakat atau lembaga di luar lingkup secretariat DPRD dan Pemerintah Kota.

Adapun alamat website dan Akun media Sosial yang di gunakan dalam publikasi eksternal adalah sebagai berikut :

1. Website : www.dprd-kendari.go.id
2. Facebook : DPRD kota kendari
3. Instagram : humas DPRD Kota kendari
4. Youtube : HUMAS & PRO. DPRD KOTA KENDARI

Dengan Publikasi Eksternal Melalui Pemanfaatan beberapa media dalam mempublikasikan kegiatan DPRD kota Kendari, berarti menambah variasi media informasi publik. Variasi media berarti memungkinkan variasi kemasan pesan. Ini penting agar pola penyebaran informasi tidak monoton. Selain itu, humas memperhatikan perilaku dan kebutuhan publik dalam mengonsumsi informasi. Ini berkaitan dengan perubahan konsumsi informasi yang membutuhkan kecepatan sumber. Sub. Bagian Humas dan Protokoler sangat terbantu dengan keberadaan website dan media Sosial.

Publikasi Eksternal tidak lepas dari pendokumentasian kegiatan DPRD Kota Kendari baik berupa arsip foto, dan film. Dokumentasi juga digunakan untuk keperluan sumber informasi yang cukup penting mengenai kegiatan DPRD yang kemudian dianalisis, dievaluasi, dan hingga disimpan sebagai bahan pendokumentasian. Ruslan mengemukakan dokumentasi berkaitan dengan kegiatan menghimpun, mengolah, menyeleksi, dan menganalisis kemudian mengevaluasi

seluruh data informasi, dan dokumen tentang suatu kegiatan, peristiwa atau pekerjaan tertentu yang dipublikasikan baik melalui media elektronik maupun cetak dan kemudian disimpan secara teratur dan sistematis.

Peneliti selanjutnya menjabarkan aktivitas Sub. Bagian Humas dan Protokler DPRD Kota Kendari dalam melakukan publikasi eksternal. Dengan adanya Publikasi Eksternal tentu akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan karena melalui Sub. Bagian Humas dan Protokler, DPRD dapat melaksanakan penyampaian informasi tentang Kegiatan Anggota DPRD dalam menjalankan Fungsinya yaitu Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan serta dengan Publikasi Masyarakat juga dapat mengetahui bagaimana Anggota DPRD memperjuangkan Aspirasi masyarakat melalui, penjelasan mengenai kebijakan atau tindakan – tindakan tertentu serta kegiatan – kegiatan dalam melaksanakan kewajiban atau tugas anggota DPRD Kota Kendari. Hal ini juga dikemukakan oleh John D. Millet bahwa salah satu tugas humas pemerintah yaitu memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga/instansi pemerintahan yang bersangkutan.

Untuk mengetahui adanya dampak Publikasi eksternal bagi peningkatan kinerja Anggota DPRD Kota Kendari maka peneliti menggunakan Angket yang berisi pernyataan yaitu Publikasi Eksternal dapat menjadi Motivasi bagi Anggota DPRD dalam meningkatkan Kinerjanya.

Adapun tanggapan responden dari hasil penelitian mengenai Dampak Publikasi Eksternal terhadap peningkatan Kinerja Anggota DPRD dinyatakan sebanyak 16 responden atau 66,66% yang menyatakan sangat Berdampak, dan sebanyak 5 responden atau 20,83% yang menyatakan Berdampak, 3 responden atau 12,5% menyatakan Kurang Berdampak dengan alasan publikasi yang dilakukan dengan video tidak menampilkan semua anggota DPRD yang hadir tetapi hanya menampilkan anggota DPRD yang vokal atau sering memberikan pendapatnya dalam rapat, serta 0 responden atau 0% yang menyatakan tidak Berdampak dan 0 atau 0% responden menyatakan Sangat Tidak Berdampak.

Hal diatas menggambarkan bahwa sebagian besar responden sangat setuju jika Pulikasi eksternal memiliki dampak dalam peningkatan kinerja mereka hal ini sesuai dengan observasi yang dilakukan Peneliti yang melihat antusiasme Anggota DPRD dalam mengikuti Kegiatan DPRD dan dikuatkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Syahrudin staff Sub. Bagian Humas dan Protokol tentang Publikasi Eksternal dengan pemanfaatan media social (facebook, instagram, youtube) dan web apakah dapat berdampak pada peningkatan kinerja DPRD.

C. Kinerja

Kinerja adalah hasil dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama satu periode waktu tertentu. Kinerja dapat dilihat dari berbagai sudut pandang tergantung pada tujuan organisasi masing-masing. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai suatu organisasi atau sekelompok orang atau individu atas suatu pelaksanaan tugas yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya dalam kurun waktu tertentu dengan cara yang benar, oleh karena itu setiap karyawan harus memiliki kemampuan dan keahlian untuk melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya (Sianipar dan Entang, 2005:67). Indikator yang dipakai dalam mengukur kinerja DPRD Kota Kendari adalah produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas.

1. Produktivitas

Pribadi yang produktif menggambarkan potensi, persepsi dan kreativitas seorang yang senantiasa ingin menyumbangkan kemampuannya agar bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Jadi orang yang produktif adalah orang yang dapat memberikan sumbangan yang nyata dan berarti bagi lingkungan sekitarnya, imaginative dan inovatif dalam mendekati persoalan hidupnya serta mempunyai kepandaian (kreatif) dalam mencapai tujuan hidupnya. Pada saat bersamaan orang seperti itu selalu bertanggung jawab dan responsif dalam hubungannya dengan orang lain (kepemimpinan)

Produktivitas pada dasarnya dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi individu dan dimensi organisasi. Pengkajian masalah produktivitas dari dimensi individu tidak lain melihat produktivitas terutama dalam hubungannya dengan karakteristik - karakteristik kepribadian individu. Dalam konteks ini esensi pengertian produktivitas adalah sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini (Kusnendi, 2003:8.4).

Sementara itu ditinjau dari dimensi keorganisasian, konsep produktivitas secara keseluruhan merupakan dimensi lain dari pada upaya mencapai kualitas dan kuantitas suatu proses kegiatan berkenaan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, selalu berorientasi kepada bagaimana berpikir dan bertindak untuk mendayagunakan sumber masukan agar mendapat keluaran yang optimum. Dengan demikian konsep produktivitas dalam pandangan ini selalu ditempatkan pada kerangka hubungan teknis antara masukan (input) dan keluaran (output) (Kusnendi, 2003: 8.4).

Melalui konsep produktivitas, dapat dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh hasil kerja/kinerja DPRD Kota Kendari periode 2019-2024 melaksanakan fungsinya yaitu :

a) Fungsi Legislasi

- b) Fungsi Anggaran
- c) Fungsi Pengawasan

Untuk lebih mengetahui adanya dampak publikasi bagi peningkatan kinerja anggota DPRD kota kendari melalui pelaksanaan Fungsi DPRD maka peneliti merincinya sebagai berikut :

a. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi adalah salah satu fungsi DPRD yaitu membuat peraturan daerah (Perda) perda yang di buat DPRD bisa lahir dari aspirasi masyarakat yang di sampaikan kepada DPRD melalui Rapat dengar pendapat ataupun saat Reses sehingga menjadi Raperda inisiatif DPRD jumlah perda yang di hasilkan DPRD menjadi ukuran kinerja DPRD dalam menjalankan Fungsinya. Fungsi Legislasi DPRD adalah fungsi untuk membuat Peraturan daerah yang di butuhkan untuk mendukung jalannya pemerintahan, Fungsi legislasi diantaranya adalah

- (1) fungsi untuk membentuk peraturan daerah (Perda) bersama kepala daerah (*DPRD adalah policy maker, bukan policy implementator*),
- (2) fungsi strategis yang menempatkan DPRD sebagai "lembaga terhormat" dalam mengembang amanah dan memperjuangkan aspirasi rakyat,
- (3) merupakan "fungsi perjuangan" untuk menentukan keberlangsungan serta masa depan daerah,
- (4) merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak/stakeholders (menurut Pusat Informasi Proses Legislasi Indonesia).

Berdasarkan data BPS Kota kendari tahun 2018 DPRD kota kendari telah mensahkan 11 peraturan daerah dan 5 diantaranya adalah perda inisiatif DPRD Kota Kendari. Peneliti selanjutnya menganalisa Publikasi yang di lakukan Oleh Sub Bagian Humas dan protokoler DPRD Kota Kendari untuk mengetahui perda yang telah di hasilkan Oleh Anggota DPRD Kota Kendari. Dari hasil analisa tersebut didapatkan informasi bahwa dari periode bulan desember 2019 hingga bulan Agustus 2020 DPRD kota kendari telah melakukan pembahasan dan penetapan Raperda menjadi perda yaitu sebagai berikut :

1. perda pajak Hotel
2. Perda pajak restoran
3. Perda pajak parkir
4. Perda Pajak air tanah
5. Perda Pajak pengelolaan keuangan daerah
6. Perda Retribusi Jasa Usaha
7. Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan

8. Perda Kawasan Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan Pemukiman kumuh.
9. Perda rencana pembangunan industri kota kendari tahu 2020 – 2040
10. Perda Pemebentukan Kecamatan nambo
11. Perda penanggulangan Penyakit Menular.
12. Perda kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita
13. Perda pencegahan dan penanggulangan prilku prostitusi, dan
14. Perda Disabilitas (tidak di lanjutkan pembahasannya di karena hambatan belum adanya fasilitas umum yang mendukung aktivitas disabilitas)

Selama melakukan Observasi peneliti melihat ada kegiatan DPRD yang melahirkan Raperda inisiatif akan tetapi peneliti tidak melihat adanya Dampak langsung dari publikasi yang di lakukan Sub. Bagian humas dan protokoler dalam peningkatan kinerja anggota DPRD pada pelaksanaan Fungsi Legislasi. Untuk mengetahui adanya dampak Publikasi bagi peningkatan kinerja Anggota DPRD Kota Kendari maka peneliti menggunakan Angket yang berisi pernyataan Dampak dari publikasi Sub. Bagian Humas dan Protokoler dapat meningkatkan kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi (pembentukan perda).

Adapun tanggapan responden dari hasil penelitian mengenai dampak Publikasi Bagi peningkatan kinerja Anggota DPRD Kota Kendari dalam pelaksanaan fungsi legislasi menyatakan sebanyak 0 responden atau 0% yang menyatakan sangat Berdampak, dan sebanyak 2 responden atau 8,33% yang menyatakan Berdampak, 3 responden atau 12,5% menyatakan Kurang Berdampak, serta 15 responden atau 62,5% yang menyatakan tidak Berdampak dan 4 atau 16,66% responden menyatakan Sangat Tidak Berdampak.

3 responden atau 12,5% menyatakan Kurang Berdampak, 15 responden atau 62,5% yang menyatakan tidak Berdampak dan 4 atau 16,66% responden menyatakan Sangat Tidak Berdampak. Dengan alasan Perda inisiatif DPRD yang merupakan produk legislasi DPRD di dapatkan melalui Rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang membahas aduan masyarakat dan tidak semua aduan masyarakat dapat melahirkan Perda. karena Perda tergantung kebutuhan masyarakat saja. Sub. Bagian humas dan Protokoler hanya mempublikasikan Kegiatan DPRD adapun pembahasan Perda Merupakan Tugas Dari BAPEMPERDA.

Hal ini di kuatkan dari hasil wawancara yang di lakukan kepada Kasubag humas dan Protokoler, Bapak Bobi Adrian Sabara. Tentang apakah Publikasi yang di lakukan Sub. Bagian humas dan Protokoler berdampak pada kinerja anggota DPRD dalam pelaksanaan Fungsi legislasi? Dari hasil wawanara sebenarnya tidak ada dampak langsung Publikasi dengan jumlah Perda Yang di hasilkan DPRD karena Perda Kan dari Aspirasi masyarakat yang di dapatkan dari masalah masalah yang di adukan

di DPRD dan berapapun usulan Perda yang masuk Pasti Bapemperda selalu menindak lanjutinya.

Publikasi hanya berdampak pada Pimpinan dan Anggota BAPEMPERDA tetapi bukan pada Jumlah atau capaian perda yang di hasilkan tapi lebih pada disiplin yaitu keaktifan mereka dalam mengikuti Rapat Pembahasan perda karena Publikasinya bukan hanya berupa gambar tetapi video juga

b. Fungsi Anggaran

Kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan (UU No. 32 tahun 2004, Pasal 40 dan 41). Fungsi penganggaran merupakan salah satu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama-sama dengan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan fungsi penganggaran tersebut, DPRD harus terlibat secara aktif, proaktif dan bukan reaktif, dimana sebagai lembaga legitimasi usulan RAPBD yang diajukan oleh pemerintah daerah saja.

Keterlibatan DPRD secara aktif dan proaktif diimplementasikan dalam setiap proses / tahapan penyusunan APBD yang diagendakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006. Di sini anggota DPRD dituntut untuk piawai mengagregasikan kepentingan, tuntutan dan kebutuhan rakyat selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan. Untuk itu, maka perlu memahami makna anggaran itu sendiri dengan baik.

Dalam arti dinamis yang dimaksud anggaran adalah ;

1. Rencana keuangan yang menerjemahkan penggunaan sumber-sumber yang tersedia untuk memenuhi aspirasi masyarakat menuju penciptaan kehidupan rakyat yang lebih baik di masa yang akan datang.
2. Rencana keuangan PEMDA untuk membangun perikehidupan masyarakat yang tentunya semakin berkembang dan dinamis yang tercermin dalam kegiatan, untuk mendorong rakyat dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara.
3. Proses penentuan jumlah alokasi sumber-sumber ekonomi untuk setiap program dan aktivitas dalam bentuk satuan uang.

Dari hasil observasi yang di lakukan peneliti melihat Walaupun peliputan yang dilakukan pada setiap tahapan pembahasan Anggaran akan tetapi publikasi kegiatan DPRD tentang Pelaksanaan fungsi Anggaran DPRD tidak mencantumkan nominal angka atau jumlah anggaran pada artikel atau video yang di tampilkan hanya berupa artikel secara garis besarnya saja. Ini di sebabkan arahan dari atasan agar publikasi terkait anggaran tidak secara mendetail di lakukan agar tidak menimbulkan

penafsiran yang salah di masyarakat. Karena berapapun besaran anggaran yang ditetapkan tidak akan mampu mengakomodir semua keinginan masyarakat dalam berbagai hal karena anggaran tersebut sudah di alokasikan berdasarkan skala prioritas yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

Hal ini sesuai jawaban yang di berikan informan Bapak Syahrudin Staff yang juga merupakan admin publikasi saat wawancara yang menanyakan apakah Publikasi dapat meningkatkan kinerja anggota DPRD kota kendari pada pelaksanaan fungsi anggaran?

Selanjutnya untuk mengetahui adanya dampak publikasi bagi pelaksanaan fungsi Anggaran DPRD peneliti menggunakan Angket yang berisi pernyataan Dampak dari publikasi Sub. Bagian Humas dan Protokoler dapat meningkatkan kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi Anggaran (Pembahasan RAPBD).

Adapun tanggapan responden dari hasil penelitian mengenai dampak Publikasi Bagi peningkatan kinerja Anggota DPRD Kota Kendari dalam pelaksanaan fungsi legislasi sebagaimanapada table diatas,dimanadinyatakansebanyak 0 respondenatau 0% yang menyatakan sangat Berdampak, dan sebanyak 0 responden atau 0% yang menyatakan Berdampak, 4 responden atau 16,66% menyatakan Kurang Berdampak, serta 14 responden atau 58,33% yang menyatakan tidak Berdampak dan 6 atau 25% responden menyatakan Sangat Tidak Berdampak.

Dari hasil angket ini membenarkan bahwa publikasi tidak memberikan dampak bagi kinerja anggota DPRD Kota kendari dalam pelaksanaan fungsi anggaran karena sebanyak 4 responden atau 16,66% menyatakan Kurang Berdampak, 14 respondenatau 58,33%yangmenyatakan tidak Berdampak dan 6 atau 25% responden menyatakan Sangat Tidak Berdampak.

Hai ini disebabkan Tanpa adanya Publikasi Kinerja anggota DPRD biasanya meningkat pada saat penyusunan APBD atau pembahasan Anggaran karena dalam penyusunannya terdapat alokasi anggaran yang berhubungan dengan kepentingan Anggota DPRD pada Daerah Pemilihan salah satunya Anggaran Pokir atau yang biasa di sebut dana aspirasi. walaupun peliputannya dilakukan pada setiap tahapan Pembahasan Anggaran.

c. Fungsi pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD selain fungsi legislasi dan anggaran. Seyogyanya aspirasi masyarakat dalam bidang pengawasan, secara melembaga sudah terwakili melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPRD. Fungsi pengawasan ini diharapkan bisa berjalan efektif sesuai harapan masyarakat, peraturan dan perundangundangan yang berlaku. Pengawasan DPRD

bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Fungsi pengawasan DPRD lebih bersifat pengawasan politik dan kebijakan, bukan pengawasan teknis fungsional. DPRD pada hakekatnya merupakan organ pemerintahan di tingkat lokal yang mengemban harapan rakyat untuk berperan sebagai representasi dan agenda kepentingan rakyat melalui proses perumusan kebijakan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Pengawasan DPRD bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Pengertian dasar pengawasan DPRD meliputi pemahaman tentang arti penting pengawasan, syarat pengawasan yang efektif, ruang lingkup dan proses pengawasan. Dalam tata pemerintahan yang baik, pengawasan berperan memberikan informasi sedini mungkin sebagai bagian dari peringatan dini (*early warning system*) bagi pemerintah daerah. Pengawasan akan memberi umpan balik untuk perbaikan pengelolaan pembangunan, sehingga tidak keluar dari jalur/tahapan dan tujuan yang ditetapkan, agar aktivitas pengelolaan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

Fungsi pengawasan DPRD adalah pengawasan politik dan kebijakan yang bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan di daerah.

untuk mengetahui adanya dampak publikasi bagi pelaksanaan fungsi Pengawasan DPRD peneliti menggunakan Angket yang berisi pernyataan Dampak dari publikasi Sub. Bagian Humas dan Protokoler dapat meningkatkan kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi Pengawasan.

Adapun tanggapan responden dari hasil penelitian mengenai dampak Publikasi Bagi peningkatan kinerja Anggota DPRD Kota Kendari dalam pelaksanaan fungsi legislasi menyatakan sebanyak 9 responden atau 37,5% yang menyatakan sangat Berdampak, dan sebanyak 13 responden atau 54,16% yang menyatakan Berdampak, 2 responden atau 8,33% menyatakan Kurang Berdampak dengan alasan yang sama seperti Publikasi eksternal diatas yaitu Video yang di publikasi tidak menampilkan semua Anggota DPRD yang Hadir dalam Rapat tetapi hanya Anggota DPRD yang Vokal atau yang sering bersuara dalam Rapat saja, serta 0 responden atau 0% yang menyatakan tidak Berdampak dan 0 atau 0% responden menyatakan Sangat Tidak Berdampak.

Hal diatas menggambarkan bahwa Anggota DPRD kota kendari merasakan dampak publikasi Sub.Bagian humas dan Protokoler bagi peningkatan kinerjanya dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya kebijakan pemerintah daerah.

Dari hasil wawancara dengan informan bapak syahrudi staf Sub. Bagian humas dan protokoler dengan pertanyaan Publikasi Sub. Bagian Humas dan Protokoler Apakah dapat meningkatkan kinerja DPRD dalam hal dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

Publikasi Kegiatan yang berupa foto dan video serta Artikel yang menjelaskan jalannya kegiatan akan memotivasi anggota DPRD untuk lebih meningkatkan kinerja fungsi Pengawasan mereka terhadap jalannya Kebijakan dan program pemerintah itulah saat ada kegiatan DPRD yang berhubungan dengan fungsi pengawasan antusias anggota DPRD sangat besar untuk mengikutinya ini mungkin berhubungan dengan citranya positif yang di dapat dari publikasi itu.

2. Responsivitas

Responsivitas lembaga Legislatif di jabarkan melalui adanya beberapa keluhan masyarakat terkait program Pemerintah daerah dan sikap anggota Dewan dalam merespon keluhan masyarakat serta penggunaan keluhan masyarakat sebagai referensi bagi penyusunan kebijakan dan langkah perbaikan di masa mendatang.

Melalui indikator ini dapat dipergunakan untuk mengukur DPRD Kota Kendari dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan program-program pemerintah daerah yang disalurkan melalui fungsi legeslasi, anggaran dan pengawasan. Utamanya DPRD harus responsif dan dapat menselaraskan hubungan simbiose mutualistik antara tiga sektor yaitu; Pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk membangun dan melaksanakan otonomi daerah.

Untuk mengetahui adanya dampak publikasi Sub. Bagian humas dan Protokoler bagi peningkatan kinerja anggota DPRD berupa Responsivitas peneliti mengajukan angket yang berisi pernyataan bahwa Publikasi Sub. Bagian Humas dan Protokoler dapat membantu menselaraskan aspirasi masyarakat dengan program-program pemerintah daerah yang disalurkan melalui fungsi legeslasi, anggaran dan pengawasan.

Adapun tanggapan responden dari hasil penelitian mengenai dampak Publikasi Bagi peningkatan kinerja Anggota DPRD Kota Kendari berupa Responsivitas menyatakan sebanyak 5 responden atau 20,83% yang menyatakan sangat Berdampak, dan sebanyak 10 responden atau 41,66% yang menyatakan Berdampak, 5 responden atau 20,83% menyatakan Kurang Berdampak, serta 4 responden atau

16,66% yang menyatakan tidak Berdampak dan 0 atau 0% responden menyatakan Sangat Tidak Berdampak.

Dari hal diatas dapat di lihat bahwa sebagaianbesar responden merasakan dampak dari publikasi sub. Bagian humas dan protokoler terhadap kinerja Anggota DPRD berupa responsivitas. Hal ini juga di perkuat saat peneliti mewawancarai informan Staf humas dan protokoler bapak Syahrudin, dengan pertanyaan Apakah Publikasi Sub. Bagian Humas dan Protokoler dapat membantu menselaraskan aspirasi masyarakat dengan program-program pemerintah daerah yang disalurkan melalui fungsi legeslasi, anggaran dan pengawasan

Dari hasil angket terdapat 5 responden atau 20,83% menyatakan Kurang Berdampak, dan 4 responden atau 16,66% yang menyatakan tidak Berdampak hal ini karena walaupun publikasi memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan DPRD yang searah dengan Program Pemerintah Daerah akan tetapi tidak semua aspirasi masyarakat dapat di akomodir contohnya melalui Fungsi legislasi dimana tidak semua aspirasi masyarakat dapat melahirkan Peraturan daerah sehingga dianggap tidak dapat meningkatkan kinerja anggota DPRD.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan usaha pokok kerja yang ditampilkan oleh lembaga publik dalam memberikan sebuah pertanggung jawaban dan keterangan sebenarnya oleh badan hukum atau pimpinan institusi secara kolektif kepada pihak yang diberi tanggung jawab untuk memeriksa kinerja atau berani memberikan pertanggung jawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kepada publik yang tujuan akhirnya adalah bermanfaat bagi kepentingan masyarakat umum.

Hakikat dari akuntabilitas sendiri merupakan komitmen yang dimiliki oleh petugas publik yang dalam hal ini adalah DPRD Kota Kendari dalam rangka menjaga tugas dan fungsinya sebagai DPRD untuk terus tanpa kompromi dan kekuatan intervensi internal kelompok sehingga hanya memiliki tujuan yang satu yaitu mengurus segala kepentingan dan kebutuhan publik secara menyeluruh, baik kelompok atas, bawah. Untuk itu petanggung jawaban memiliki hasil akhir pada kepentingan publik dengan mengharapkan ada perubahan dari sisi kualitas kinerja dari pejabat publik. (Elgia Astuty, 2013).

Anggota DPRD yang telah di pilih oleh masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi dari masyarakat yang telah memilihnya hal tersebut di salurkan melalui 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi Pengawasan yang melekat pada Lembaga DPRD. pelaksanaan 3 fungsi tersebut harus selaras dengan arah kebijakan pemerintah daerah.

Akuntabilitas dapat dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh kinerja DPRD Kota Kendari melaksanakan fungsi-fungsinya secara konsisten untuk

memperjuangkan aspirasi masyarakat pemilih karena anggota DPRD merupakan representasi wakil masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) sedangkan pada sisi lain DPRD adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah bersama-sama kepala daerah.

Untuk dapat mengukur dampak publikasi terhadap peningkatan kinerja Anggota DPRD Kota Kendari melalui indikator Akuntabilitas peneliti mengajukan pernyataan melalui angket yaitu Publikasi Sub. Bagian humas dan protokoler memberi dampak bagi peningkatan kinerja Anggota DPRD yaitu meningkatkan konsistensi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Adapun tanggapan responden dari hasil penelitian mengenai dampak Publikasi Bagi peningkatan kinerja Anggota DPRD Kota Kendari berupa Responsivitas menyatakan sebanyak 9 responden atau 37,5% yang menyatakan sangat Berdampak, dan sebanyak 10 responden atau 41,66% yang menyatakan Berdampak, tetapi 3 responden atau 12,5% menyatakan Kurang Berdampak, dan terdapat 2 responden atau 8,33% yang menyatakan tidak Berdampak dengan alasan walaupun publikasi bisa menjadi motivasi untuk meningkatkan konsistensi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat akan tetapi kadang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat ini terjadi karena keterbatasan anggaran yang dimiliki anggota DPRD dan 0 atau 0% responden menyatakan Sangat Tidak Berdampak.

Dari keseluruhan hasil angket ini membenarkan bahwa publikasi Sub. Bagian Humas dan protokoler memberikan dampak bagi kinerja anggota DPRD Kota Kendari yaitu meningkatkan konsistensi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan kepada informan staff Sub. Bagian humas dan protokoler bapak syahrudin, yaitu apakah publikasi dapat meningkatkan kinerja anggota DPRD Kota Kendari dalam hal ini konsistensi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat

Memiliki dampak karena Publikasi kami selalu mengikuti Kegiatan DPRD mulai dari penerimaan aspirasi, Rapat dengar pendapat umum (RDPU), sampai tindak lanjut dari hasil RDPU hingga Melahirkan sebuah kebijakan atau keputusan sehingga menjadi informasi bagi masyarakat dan juga publikasi tersebut akan membentuk citra positif anggota DPRD dan menjadi motivasi bagi anggota DPRD dalam peningkatan Kinerjanya

Publikasi memperlihatkan bagaimana konsistensi anggota DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Walaupun hasilnya belum tentu memberi kepuasan pada seluruh masyarakat akan tetapi dengan publikasi masyarakat bisa mengetahui bahwa anggota DPRD yang dipilih telah bekerja sehingga tetap menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Simpulan

Publikasi yang dilakukan Oleh Sub. Bagian Humas dan Protokoler adalah melalui Buletin kantor dan Mading etalse dianggap sebagai Publikasi internal dan melalui Website dan media social (facebook, instagram, dan Youtube) sebagai Publikasi Eksternal dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Publikasi eksternal lebih memberikan dampak bagi peningkatan kinerja anggota DPRD Kota Kendari dari pada publikasi internal hal ini di sebabkan jangkauan sebaran informasi berita kepada masyarakat melalui media social dan website lebih luas dari pada media yang di gunakan dalam publikasi internal
2. Publikasi Sub. BagianHumas dan Protokoler lebih berdampak Pada Peningkatan kinerja fungsi Pengawasan DPRD di bandingkan dengan Fungsi legislasi dan fungsi anggaran hal ini di sebabkan karena kedua fungsi tersebut sarat kepentingan dan juga Pimpinan dan anggota DPRD yang masukdalam BAPEMPRDA telah mengetahui tugas dan fungsinya sehingga setiap usulan perda yang masuk segera di bahas karena itu tanpa adanya publikasi kinerja Anggota DPRD bisa meningkat. peneliti menganggap Publikasi yang di lakukan hanya sebagai informasi kepada masyarakat terkait kegiatan Anggota DPRD Kota Kendari.
3. Publikasi sub. Bagian humas meningkatkan konsistensi anggota DPRD dalam memperjuangkan asprasi masyarakat karena Publikasi yang di lakukan dari awal penerimaan Aspirasi hingga Keluarnya Kepuasan atau rekomendasi yang di hasilkandari Rapat RDPU sehingga memotivasi anggota DPRD untuk selalu mengikuti kegiatan DPRD yangberhubungan dengan aspirasi masyarakat
4. Publikasi Sub. Bagian Humas dan Protokoler juga mempunyai dampakbagipeningkatan Kedisiplinan anggota DPRD dalam MengikutiKegiatan yang berkaitan denga tugas dan Fungsinya.

Referensi

A.W Widjaja, 1992, *Titik Berat Otonomi Daerah Tingkat II*, Jakarta, Rajawali Press.

Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab (Jakarta: Prenada Media, 2004). *Psikologi Suatu PengantarDalam Perspektif Islam*.

Agus Dwiyanto dkk.2002. *Reformasi Birokrasi Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan.Yogyakarta.

Lesley, Philips.1992. *Lesly's Handbook Of Public Relation Philip Lesley* 1991and Communication

Atik,dan ratminto. 2005. *Manajemen Pelayanan, disertai dengan pengembangan model konseptual, penerapan citizen's charter dan standar pelayanan minimal.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Bambang Siswanto. 1992. *Hubungan Masyarakat Teori dan Praktek.* Jakarta: Bumi Aksara

Bambang Guritno dan waridin (2005) Guritno, *Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Perilaku Kepemimpinan, Kepuasan Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja.*

Bernardin, H.J. & Russel, J.E.A (1993). *Human Resource Management an experiental approach.* Singapore: Mc Graw-Hill, Inc.

Dwiyanto, Agus 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik.*Yogyakarta : Fisipol UGM.

Ismiani, Nanik. (2010). *Modul Strategi Image/Soft Sell.* Jakarta: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana.

Iriantara, Yosai. 2004. *Manajemen Strategis Public Relations.* Jakarta.

Jefkins, Frank. 1992. *Public Relations (Edisi Keempat).*Jakarta : Erlangga.

Tika H. Moh. Pabundu, 2006. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan,* Cetakan Pertama, PT. Bhumi Aksara, Jakarta.

Keban, Yeremias T. 1995. *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah, Pendekatan Manejemen Dan Kebijakan,*Yogyakarta : Fisip USM

Ruslan,Rosady.2008. *Manajemen Public Relatoins & Media Komunikasi.*Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Soemirat, Soleh & Ardianto, Elvinaro, 2007, *Dasar-Dasar Public Relations,*Bandung, Rosdakarya.

Sumber jurnal

jurnal Peranan Badan Informasi Publik(BIP) dalam Pemberian Layanan Informasi Publik Pada Pemerintah Kota Bandung, 2010:9)

Fuad, *jurnal administrasi negara* (2000;24)

Sumber Undang – Undang

Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004*tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 *tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*